

Better Policies Better Lives

LAPORAN EVALUASI

PROGRAM RINTISAN KEBIJAKAN BERBASIS PENGETAHUAN (KNOWLEDGE-TO- POLICY) DI SULAWESI SELATAN

APRIL 2022



DERRY PANTJADARMA



Laporan Akhir

**Program Rintisan Kebijakan Berbasis Pengetahuan
(Knowledge-to-Policy) di Sulawesi Selatan**

April 2022

DERRY PANTJADARMA

Penafian

Laporan ini disusun dan didanai oleh Knowledge Sector Initiative. Sudut pandang dari dokumen ini sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis dan tidak mewakili pandangan dari KSI, RTI International, DFAT, ataupun Pemerintah Australia.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
EXECUTIVE SUMMARY	vi
1. LATAR BELAKANG	1
2. TEMUAN EVALUASI	3
2.1. Perubahan persepsi/pengetahuan/perilaku aktor lokal.....	3
2.1.1. Terhadap pembuatan kebijakan berbasis bukti.....	3
2.1.2. Terhadap penggunaan bukti	6
2.2. Faktor Penguatan Proses K2P	8
2.2.1. Komitmen dan kepemimpinan	8
2.2.2. Insentif	9
2.3. Faktor-faktor pembentuk keberhasilan proses K2P	10
2.4. Faktor-faktor kendala keberhasilan	11
3. REPLIKASI DAN KEBERLANJUTAN	13
4. REKOMENDASI SPESIFIK UNTUK REPLIKASI DAN BERKELANJUTAN K2P	18
4.1. Pemerintah daerah provinsi	18
4.2. Pemerintah pusat.....	19
4.3. Perguruan tinggi.....	20
4.4. Lembaga swadaya masyarakat	21
5. PRASYARAT UNTUK K2P SUBNASIONAL DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN DAN DIREPLIKASI	24
5.1. Kebijakan.....	24
5.2. Kapasitas sumber daya manusia.....	24
5.3. Kelembagaan.....	25
5.4. Sumber daya lainnya.....	26
6. KESIMPULAN	27

RINGKASAN EKSEKUTIF

Knowledge Sector Initiative (KSI) mendukung pembuat kebijakan di Indonesia dalam mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif melalui pemanfaatan riset, data dan analisis. KSI bekerja bersama lembaga dan organisasi riset serta lembaga pemerintah kunci untuk memperkuat kualitas dan relevansi riset dengan kebijakan, serta bagaimana menggunakannya dalam pembuatan kebijakan dan meningkatkan lingkungan kondusif bagi pembuatan kebijakan berbasis bukti.

Sejak tahun 2019, KSI menjalankan rintisan *Knowledge to Policy (K2P)* tingkat sub-nasional di Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuannya adalah menemukan model bagaimana *K2P* dijalankan di level sub-nasional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan fasilitasi Yayasan BaKTI mengembangkan agenda riset kebijakan dengan melakukan pengkajian rantai nilai sutra.

Evaluasi terhadap rintisan *K2P* tersebut dilakukan untuk melihat perubahan persepsi/pengetahuan/perilaku aktor lokal yang terlibat, serta prospek untuk replikasi dan keberlanjutan *K2P* di level sub-nasional.

Setelah merasakan kemanfaatan hasil rintisan tersebut, persepsi berubah dari kebiasaan kajian oleh peneliti dari universitas yang berasal dari satu bidang ilmu menjadi komprehensif dan mengarah pada implementasi oleh penggunanya. Sepanjang berkolaborasi, terjadi proses interaksi positif yang membuat para aktor lebih saling memahami karakter mitranya. Pengambil kebijakan semakin yakin pada pentingnya bukti dan pelibatan aktor non-pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Periset merasakan kualitas hasil meningkat karena terjadi proses alih pengetahuan dan menguatnya spirit kemitraan.

Perubahan persepsi dan pemahaman terhadap penggunaan bukti ditunjukkan dengan penyusunan kebijakan labelisasi sutra dan Riset Kolaboratif oleh Pemerintah Sulawesi Selatan serta replikasi kegiatan rantai nilai komoditas. Juga, menguatnya pemahaman pentingnya pendekatan multi-disipliner dan aspek GESI dalam riset kebijakan.

Proses *K2P* diperkuat utamanya oleh: 1) Komitmen formal pimpinan daerah dan *passion* Kepala Bappelitbangda sebagai mitra strategis BaKTI, dan 2) Insentif berupa pengetahuan baru dan peluang peningkatan karier periset serta peluang kemitraan Swakelola Tipe III. Kedua hal tersebut menjadi fondasi keberhasilan proses pelaksanaan rintisan.

Keberhasilan *K2P* disebabkan oleh: respons positif pimpinan daerah terhadap inisiasi *KSI* berupa lokakarya multi-pihak, keberadaan regulasi formal di level provinsi untuk sutra, kapasitas periset daerah dan peran intermediari Yayasan BaKTI yang bersama Bappelitbangda menjadi fasilitator. Khusus untuk percontohan kajian rantai nilai sutra, kesamaan pemahaman para aktor memperkuat *ownership* kegiatan. Fungsi *knowledge broker* dan fasilitator Yayasan BaKTI merupakan salah satu pilar keberhasilan.

Faktor kendala utama keberhasilan adalah: 1) Pergantian Gubernur yang mendadak, 2) Merebaknya pandemi Covid-19 dan, 3) Belum seimbanginya kapasitas SDM di Bappelitbangda sebagai penghasil pengetahuan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sektoral sebagai pengguna.

Melihat pelaksanaan rintisan tersebut, replikasi di tingkat lokal berupa kajian rantai nilai komoditas sudah dilakukan Bappelitbangda bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin, Yayasan Pilar Nusantara (PINUS)

Sulawesi Selatan dan Sekolah Rakyat Petani (SRP) Payo-Payo. Kegiatan-kegiatan ini sudah tidak didampingi BaKTI lagi karena relasi kemitraan sudah terbentuk selama kegiatan rintisan.

Walaupun demikian, ke depannya aktor intermediari masih tetap diperlukan. Secara formal Bappelitbangda dapat menjalankan fungsinya sesuai Peraturan Pemerintah No:18/2016 tentang Perangkat Daerah. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (PBJ) Swakelola Tipe III dapat menjadi instrumen kolaborasi. Adapun BaKTI atau LSM lain dapat menjalankan fungsi sejenis melalui kemitraan dengan Bappelitbangda. Jejaring kolaborasi yang sudah ada perlu terus dikembangkan. BaKTI sebagai pelopor dapat menjadi simpul pemberdayaan aktor intermediari lain.

Rekomendasi/aspirasi para aktor lokal untuk implementasi dan replikasi *K2P* yang berhasil di daerah antara lain: kepada Pemerintah Daerah dan Pusat; Bappelitbangda sebagai orkestrator, pengoptimalan regulasi, membuat *Roadmap* kolaborasi, penguatan koordinasi perencanaan dan penganggaran Provinsi, Kabupaten/Kota dan penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) periset. Bagi perguruan tinggi, supaya aktif berkontribusi pada pendanaan kegiatan *K2P*, mendorong riset multi-disipliner, menyediakan Bank Data peneliti dan meningkatkan kemanfaatan riset bagi pengguna. Untuk LSM supaya memperkuat kapasitasnya melalui kemitraan dan memperkuat jejaring dengan pembuat kebijakan.

Rekomendasi / aspirasi lokal di atas menyiratkan pentingnya penguatan semua aktor pengetahuan secara menyeluruh.

Adapun prasyarat implementasi *K2P* Sub-Nasional adalah: kebijakan kondusif, kapasitas SDM, kelembagaan dan sumberdaya lain yang memadai. Prakarsa *K2P* dapat diawali oleh sebuah kelompok kolaboratif sebagai embrio yang dibentuk pimpinan daerah. Sebelumnya, diperlukan informasi tentang potensi, ketersediaan aktor pengetahuan dan kebijakan yang kondusif bagi kolaborasi di daerah.

EXECUTIVE SUMMARY

Knowledge Sector Initiative (KSI) supports policymakers in Indonesia in developing more effective development policies through the use of research, data, and analysis. KSI collaborates with research institutions and organisations as well as key government agencies to strengthen the quality and relevancy of research to policy and how to use it in policymaking, and to improve the conducive environment for evidence-based policymaking.

Since 2019, KSI has implemented the Knowledge to Policy (K2P) initiative at the subnational level in South Sulawesi Province. The goal has been to find the model with which K2P is implemented at the subnational level. The South Sulawesi Provincial Government, with the facilitation of BaKTI Foundation (Yayasan BaKTI), has developed a policy research agenda by conducting the silk value chain assessment.

Evaluation of this K2P initiative was done to examine the perception/knowledge/behaviour change from involved local actors and the prospect for K2P replication and sustainability at the subnational level.

After receiving the benefits of this initiative, the perception shifted, from the study habits of university researchers from one field of discipline to comprehensive and geared towards implementation by users. Throughout the collaboration, there have been positive interaction processes making actors understand more about their partners' characters. Policymakers have gained more confidence in the importance of evidence and engaging non-government actors in policymaking. Researchers have felt increasing quality due to the knowledge transfer process and strengthened partnership spirit.

Perception change and understanding of the use of evidence were demonstrated with the development of silk labelling policy and Collaborative Research by the South Sulawesi Government, as well as replication of the commodity value chain activities. Also, through the strengthening understanding of a multidisciplinary approach and the GESI aspect in policy research.

The K2P process was primarily strengthened by: 1) The formal commitment of local leaders and the passion of the Head of Bappelitbangda as BaKTI's strategic partners, and 2) Incentives in the form of new knowledge and the opportunity to advance researchers' careers and a partnership opportunity in Swakelola Tipe III. Both of these became the foundation for the success of the initiative's implementation process.

The success of K2P was contributed by: the positive response of local leaders to the KSI initiative in the form of multiparty workshops, formal regulation at the provincial level for silk, local researchers' capacity, and the intermediary role of Yayasan BaKTI, along with Bappelitbangda, to become the facilitator. Specifically for the pilot of silk value chain assessment, the same understanding between actors strengthened the activities' ownership. The knowledge broker and facilitator functions by Yayasan BaKTI were one of the pillars of success.

The primary challenge factors to the success were: 1) The sudden change of the Governor, 2) The spread of the COVID-19 pandemic, and 3) The unbalanced human resource capacity in Bappelitbangda as a knowledge producer with the sectoral Local Organisations (OPD) as users.

Looking at the initiative's implementation, replication at the local level, in the form of a commodity value chain assessment, has been done by Bappelitbangda, cooperating with Hasanuddin University, Pilar

Nusantara Foundation (PINUS) of South Sulawesi Selatan, and Farmers School (SRP) Payo-Payo. These activities were no longer assisted by BaKTI due to the established partnership relation during the initiative's activities.

However, going forward, intermediary actors are still needed. Formally, Bappelitbangda can implement its functions according to Government Regulation No:18/2016 on Local Government Organisations. The Mechanism for Governmental Goods/Services Procurement (PBJ) using Swakelola Tipe III can become a collaboration instrument. BaKTI or other CSOs/NGOs can carry out similar functions through a partnership with Bappelitbangda. The existing collaboration network needs to continue to be developed. BaKTI as the pioneer can serve as a hub to empower other intermediary actors.

Recommendations/aspirations from local actors to implement and replicate successful K2P at the local level include: for Local and Central Government; making Bappelitbangda as the orchestrator, optimising regulation, developing a collaboration Roadmap, strengthening planning and budgeting at the Provincial and District/City levels, and strengthening the capacity of Civil Service (ASN) researchers. Universities should actively contribute to funding K2P activities, promoting multidisciplinary research, providing researchers' Data Bank, and increasing the benefits of research for users. CSOs/NGOs should strengthen their capacity through partnerships and strengthen their network with policymakers.

The abovementioned local recommendations/aspirations imply the importance of comprehensively strengthening all knowledge actors.

As for the prerequisites for implementing Subnational K2P, they are: conducive policy, human resource capacity, institutional aspect, and sufficient other resources. K2P initiative can be commenced by a collaborative group as an embryo established by the local leader. Prior to that, we need information on the potential and availability of knowledge actors and conducive policy for collaboration at the local level.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara besar dan beragam saat ini menghadapi tantangan kebijakan yang semakin kompleks. Dalam mengatasi tantangan ini, pengambil kebijakan publik memerlukan akses ke sumber bukti dan pengetahuan yang berkualitas serta tepat waktu. KSI mendukung pembuat kebijakan di Indonesia untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif melalui penggunaan penelitian, data, dan analisis yang lebih baik. KSI bekerja sama dengan lembaga dan organisasi riset, serta pemerintah untuk memperkuat kualitas dan relevansi kebijakan.

Sejak 2019, KSI melaksanakan program rintisan *knowledge-to-policy* di level daerah (subnasional) yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Program ini bertujuan untuk memberikan model tentang bagaimana proses dari pengetahuan ke kebijakan bekerja di tingkat subnasional. Dengan difasilitasi Yayasan BaKTI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun agenda riset kebijakan dan mengimplementasikan penelitian kebijakan analisis rantai nilai komoditas sutra sebagai bagian dari kegiatan rintisan. Percontohan K2P subnasional ini menghasilkan informasi dan pengetahuan yang luar biasa tentang bagaimana ekosistem pengetahuan bekerja di tingkat regional. Percontohan K2P di Sulawesi ini adalah satu-satunya program yang menjelaskan proses K2P secara komprehensif di level regional dan yang secara langsung didukung oleh KSI.

Kegiatan tersebut berlangsung sejak November 2019 hingga Desember 2021. Proses *agenda setting* yang mengawali program rintisan mengerucut pada kesepakatan tema kajian rantai nilai sutra dengan misi mengembalikan kejayaan sutra Sulawesi Selatan. Selanjutnya, prinsip-prinsip kolaborasi dengan berorientasi pada rekomendasi kebijakan yang konkret diterapkan dalam pelaksanaan di lapangan serta pemantauannya oleh Tim Pengendali Mutu (TPM).

Kajian dijalankan dengan langsung turun ke lapangan di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng. Para peneliti dari Bappelitbangda Provinsi Sulawesi selatan, LSM Sekolah Rakyat Petani (SRP) Payo-Payo, dan Universitas Hasanuddin mengumpulkan data, menganalisis, dan berdiskusi hingga menyusun laporan.

Sejumlah empat risalah kebijakan untuk mengembalikan kejayaan sutra Sulawesi Selatan dengan isu-isu di sektor hulu, manufaktur, hilir, dan lintas sektor dihasilkan dan diajukan kepada pemerintah provinsi. Sebagian rekomendasi diadopsi oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dalam bentuk replikasi kajian dan kebijakan berikut:

- a. Penerbitan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penggunaan Label Pada Kain Sutra Motif Khas Sulawesi Selatan.¹
- b. Penyusunan *standard operating procedure* (SOP) kajian kolaborasi ke-litbang-an sebagai referensi Bappelitbangda untuk melakukan pengkajian dengan pendekatan kolaborasi multiaktor dan lintas disiplin keilmuan.²

¹ Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 47 Tahun 2021 tentang Penggunaan Label pada Kain Sutra Motif Khas Sulawesi Selatan (diundangkan pada 6 Desember 2021)

² Surat Keputusan No: 188.4/4440/BAPPELITBANGDA tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelitbang-an Kolaborasi Provinsi Sulawesi Selatan, Agustus 2021

- c. Bappelitbangda Sulawesi Selatan melakukan kajian rantai nilai komoditas talas satoimo menggunakan pendekatan serupa menggunakan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (PBJ) Swakelola Tipe III.

Di samping itu, pembelajaran dari rintisan K2P telah dijadikan bahan penyusunan dua risalah kebijakan, yaitu; i) Masukan pada penyusunan pedoman rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan (Rakortekrenbang) 2023, dan ii) Masukan pada revisi Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Keduanya telah diajukan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Untuk melihat seberapa jauh hasil rintisan K2P berkontribusi pada pencapaian *outcome* program KSI, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Evaluasi pelaksanaan kegiatan K2P bertujuan untuk melihat pengaruh pelaksanaan dan hasil rintisan terhadap; i) Perubahan persepsi/pengetahuan/perilaku para aktor yang terlibat, dan ii) Peluang replikasi serta mendorong keberlanjutan.

Metodologi evaluasi berupa tinjauan terhadap dokumen strategi KSI subnasional 2018-2022; laporan akhir kegiatan Yayasan BaKTI; laporan akhir kajian rantai nilai sutra; dan beberapa referensi yang relevan serta wawancara mendalam dengan beberapa informan mewakili para aktor pengetahuan yang relevan di Sulawesi Selatan maupun di tingkat nasional.

2. TEMUAN EVALUASI

2.1. Perubahan persepsi/pengetahuan/perilaku aktor lokal

Pelaksanaan rintisan yang komprehensif serta kolaboratif telah membawa perubahan persepsi, pengetahuan, dan perilaku para aktor. Pengalaman terlibat dalam proses sejak agenda setting, studi ke lapangan sampai pada produksi rekomendasi kebijakan merupakan stimulus perubahan. Di samping itu, pemanfaatan bukti yang dihasilkan juga memengaruhi persepsi, pengetahuan, dan perilaku aktor.

Perubahan persepsi dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh, salah satunya, pengalaman dan penghayatan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dalam hal ini, proses pembuatan kebijakan berbasis bukti dan pemanfaatan hasilnya. Stimulus yang sama akan direspons berbeda oleh orang dengan latar belakang yang berlainan.

Perubahan-perubahan tersebut dideteksi melalui rangkaian wawancara mendalam dengan aktor individual yang terlibat mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng, para peneliti di Bappelitbangda, akademisi di Universitas Hasanuddin, SRP Payo-Payo, dan Yayasan BaKTI.

2.1.1. Terhadap pembuatan kebijakan berbasis bukti

Untuk melihat perubahan tersebut dilakukan pengelompokan aktor didasarkan pada fungsi utama terkait kebijakan yaitu; a) Pembuat kebijakan, dan b) Periset atau peneliti dan analis kebijakan. Aktor pemerintahan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap perumusan dan implementasi kebijakan daripada aktor lain. Perubahan pada kelompok tersebut memiliki peluang besar untuk replikasi kegiatan ke depan. Di sisi lain, sebagai aktor produsen pengetahuan, perubahan pada periset akan memengaruhi kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

2.1.1.1. Pembuat kebijakan.

Kemanfaatan paling signifikan diakui langsung oleh Kepala Bappelitbangda yang menganggap kajian kolaboratif ini menghasilkan terobosan dalam praktik ke-litbang-an. Semula dilakukan kajian melalui kemitraan pemerintah daerah dan perguruan tinggi yang cenderung hanya melibatkan satu aspek keilmuan saja dengan rekomendasi yang lemah, berubah menjadi lebih komprehensif dengan rekomendasi yang dapat langsung diimplementasikan. Pelibatan LSM sebagai aktor penguat membuat kajian menjadi lebih multidisipliner dan inklusif.

Perubahan persepsi terhadap kajian menjadi lebih berkelanjutan, disampaikan oleh aktor pembuat kebijakan dari Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo.

“Kalau bicara tentang kajian, saya kira ini kan sudah sejak pemerintahan berjalan sudah ada, tapi rata-rata yang dihadapi adalah bahwa kajian hanya berhenti pada output saja. Tindak lanjut dari kajian-kajian yang dilakukan selama ini masih menjadi tanda tanya. Nah, Pemprov kemudian menginisiasi kajian kolaboratif dengan melibatkan multipihak. Harapannya tentu saja bahwa hasilnya betul-betul berbasis bukti bahwa hasil kajian itu berangkat dari kondisi lapangan yang diolah sedemikian rupa sehingga nanti ada melahirkan kebijakan lanjutan sebagai hasil dari kajian sebelumnya. (Kutipan Wawancara A1³, Bappeda Kabupaten Soppeng, 1 Maret 2022)

³ Nama semua responden wawancara hanya diberikan sebagai inisial.

“Rekomendasi yang dihasilkan dari kajian ini mengagetkan saya bahwa yang diimpikan 15 tahun yang lalu kapan kita punya penelitian yang seperti ini, bisa terjawab itu 4W+1H, yaitu apa, kenapa, berapa banyak, dan bagaimana dilaksanakan, serta rentang waktu berapa. Rekomendasi yang dihasilkan tidak lagi menimbulkan pertanyaan, apa yang mau kita lakukan, siapa yang mau melakukan, berapa lama harus dilakukan, dan bagaimana? Itu sudah clear semua. Karena sebagian besar hasil penelitian sebelumnya itu masih menimbulkan pertanyaan jadi biasanya kami berpikir untuk meneliti lagi. Yang seharusnya satu penelitian yang komprehensif itu jawabannya sudah bisa didapatkan oleh pengambil kebijakan, seperti yang kemarin rantai nilai sutra ini. Akhirnya kita mengambil kesimpulan bahwa jika begini bentuknya, kita replikasi. Potensi replikasi itu sebenarnya bukan potensi lagi, tapi sudah saya jadikan kewajiban di sini”. **(Kutipan Wawancara ADB, Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel, 25 Februari 2022)**

Terhadap proses kolaborasi antara lembaga pemerintah dengan LSM, juga dialami adanya kemanfaatan bekerja sama terhadap peningkatan pengetahuan.

“Mereka melihat bahwa selama ini yang mereka takutkan berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai penelitian itu ternyata tidak menjadi sebuah ketakutan. Karena justru NGO atau partner kolaborasi lain justru memperkaya subyek dan informasi dan diskusi maupun analisis dalam penelitian. Dulu alergi untuk menambah pengetahuan mereka karena dulunya mereka bersifat pasif. Karena tidak dilibatkan, hanya ditanya. Tetapi, dengan metodologi seperti ini, mereka juga memastikan bahwa semua proses yang mereka jalani menjadi pengetahuan baru. Mereka dilibatkan dalam proses penelitian, metodologi, mereka dilibatkan untuk turun ke lapangan, selama ini mereka tidak seperti itu” **(Kutipan wawancara ADB, Kepala Bappelitbangda Sulsel, 25 Februari 2022)**

Pendapat serupa disampaikan oleh Bappelitbangda Kabupaten Wajo, tetapi lebih mendasar yaitu, terkait integritas dalam ke-litbang-an.

“Kegiatan ini sangat kami apresiasi apalagi kolaborasi kemarin sangat luar biasa karena kerja samanya sudah pentahelix, ada pemerintah, perguruan tinggi, lembaga non-pemerintah, sudah komplit. Apalagi kajiannya sudah turun ke lapangan, dan yang teman-teman laksanakan kemarin di 2021 tentang rantai nilai sangat luar biasa karena sudah mendapatkan fakta-fakta tidak terbantahkan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang diharapkan, karena dalam ke-litbang-an sendiri kita punya semboyan bahwa ke-litbang-an boleh salah, tapi tidak boleh bohong, seperti itu yang kita pegang. Jadi, apa yang kami temukan di lapangan, itu yang akan kita jadikan patron untuk mengambil keputusan selanjutnya. Alhamdulillah teman-teman di provinsi dan yang di lembaga yang non-pemerintah itu sangat membantu kami, dengan peran masing-masing. Sehingga semua aspek teknis yang ada mulai dari hulu sampai ke hilir sampai dengan perilaku masyarakatnya mereka sudah pahami semua.” **(Kutipan Wawancara AAS, Bappeda Kabupaten Wajo, 1 Maret 2022)**

Dari pandangan para aktor pembuat kebijakan tersebut di atas, nampak bahwa prinsip kolaborasi dan pengamatan lapangan menjadi hal penting untuk menghasilkan bukti yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.1.2. Periset: peneliti dan analisis kebijakan

Keterlibatan dalam seluruh rangkaian penelitian membuka pandangan baru para peneliti dan analisis kebijakan terhadap pentingnya riset dan kolaborasi dalam menghasilkan bukti untuk kebijakan.

“Kajian kolaborasi dengan melibatkan multiaktor dengan multikeahlian lebih bagus ketimbang sebelumnya yang hanya melibatkan dua (2) pihak saja (pemda dan kampus atau pemda dan NGO saja) salah satunya terjadi pertukaran pengetahuan dan saling melengkapi.” (Kutipan Wawancara AF, Fungsional Peneliti Bappelitbangda, 1 Maret 2022)

“Sebelumnya, kebanyakan kita tidak bisa membedakan fakta dan opini. Dengan riset, maka bukti bisa didapatkan dengan data sebagai dasar membuat kebijakan.” (Kutipan Wawancara DA, Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi Bappelitbangda, 1 Maret 2022)

Peneliti dari aktor non-pemerintah juga melihat kolaborasi sangat bermanfaat dalam pengayaan dalam proses penelitian. *“Kita bisa menemukan persoalan yang tadinya tidak kelihatan. Misalnya, persoalan diskriminasi gender di sepanjang rantai nilai sutra. Ini menjadi kelihatan karena menggunakan metodologi yang baru. Jadi, karena ada gabungan dari sekian banyak metodologi yang dibawa oleh orang yang berbeda-beda, dari tradisi penelitian atau dari paradigma penelitian yang berbeda-beda itu yang membuat temuannya menjadi lebih kaya. Sehingga, hal-hal yang tadinya tidak tampak menjadi kelihatan. Jadi, dengan adanya riset yang seperti ini maka itu bisa membuat kebijakan secara potensial menjadi lebih tepat sasaran. Bisa sampai ke akar masalah.” (Kutipan Wawancara NS, SRP Payo-Payo, 1 Maret 2022)*

Pandangan bahwa identifikasi akar masalah itu penting akan sangat bermanfaat pada waktu kegiatan sejenis direplikasi. Hasil penelitian dapat didorong pada rekomendasi kebijakan yang sudah siap diimplementasikan oleh lembaga pengguna, yaitu OPD sektoral. Hal tersebut dapat menjadi modal untuk kolaborasi antara penghasil dan pengguna pengetahuan yang lebih mendalam ke depannya. Lebih jauh, peneliti dari Universitas Hasanuddin sudah menunjukkan tindakan nyata untuk melakukan riset kolaboratif bersama Bappelitbangda dan SRP Payo-Payo bertema kajian rantai nilai agrowisata di Malino pada tahun 2022. Bentuknya adalah kontribusi pendanaan sebesar 20% dari anggaran Rp 250 Juta.⁴ Aspek yang perlu dijaga untuk kajian rantai nilai setiap komoditas adalah sifat komprehensif dan inklusif.

Pengaruh dari interaksi selama bekerja bersama adalah tumbuhnya saling pengertian akan budaya masing-masing. Pada gilirannya, ini mampu mendorong pengembangan kolaborasi ke depan. Peran individu dalam merintis kolaborasi diawali oleh saling memahami dan menghormati setiap pihak (Markova dan McArthur, 2015).⁵ Hal tersebut akan membentuk benih-benih saling percaya (*trust*). Interaksi dan komunikasi yang mengikutinya dalam berbagai bentuk akan memperkuat *trust* ini.

⁴ Komunikasi melalui Whatsapp antara Pak Nehru dengan informan dari Bappelitbangda, 11 Maret 2022. [Hal ini menunjukkan sudah timbul benih *trust* berupa kontribusi anggaran.](#)

⁵ Markova.D dan Mc.Arthur. A: "Collaborative Intelligence: Thinking with People who Think Differently", Random House, New York, 1st Ed, 2015.

2.1.2. Terhadap penggunaan bukti

2.1.2.1. Pembuat kebijakan

Pengaruh rekomendasi kebijakan hasil dari rintisan K2P tersebut dirasakan langsung oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengguna rekomendasi kebijakan di segmen hilir rantai nilai sutra. OPD ini secara aktif merancang program terkait dan bersama Bappelitbangda menyusun Peraturan Gubernur tentang Labelisasi Sutra Khas Sulawesi Selatan.

“Kalau seandainya tidak ada hasil kajian ini, kami tidak bisa meyakinkan pimpinan (Gubernur, red) bahwa ini dilakukan karena sudah dilakukan kajian sebelumnya sehingga ketika terjadi refocusing anggaran besar-besaran akibat pandemi, sektor sutra di program kami tidak terkena refocusing. Walaupun ada, tidak semuanya. Kajian berbasis bukti ini sangat membantu, ilmiah. Karena kalau memberi alasan ke pimpinan harus ada bukti nyatanya.” (Kutipan Wawancara AA, Kadis Perindustrian Sulsel, 22 Februari 2022)

Respons lain dari pemanfaatan bukti ditunjukkan dengan diterbitkannya kebijakan untuk menerapkan praktik K2P oleh Kepala Bappelitbangda berupa Surat Keputusan (SK) tentang Riset Kolaboratif merespons rekomendasi kebijakan lintas sektor pada komoditas sutra. Kebijakan tersebut mengatur peran dan tanggung jawab multi pihak serta prosedur operasional standar (SOP) kerja sama antar instansi/lembaga ke-litbang-an kolaborasi yang meliputi pengaturan administrasi dan keuangan pelaksanaan kelitbang-an kolaborasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten/kota. Pada tahun 2022 statusnya akan ditingkatkan menjadi Peraturan Gubernur agar dapat menjadi pedoman seluruh OPD dan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

2.1.2.2. Periset: peneliti dan analis kebijakan

Pengalaman periset menunjukkan keberadaan bukti dengan didukung data lapangan berhasil mendorong pemanfaatan rekomendasi kebijakan dan dapat diterapkan oleh pengguna. Dengan demikian, para periset langsung merasakan kemanfaatan positif sebagai akibat dari kemampuannya berkontribusi pada pelaksanaan tugas fungsi lembaganya.

“Dari hasil ini kan pimpinan kami sangat merasa inilah sesuatu yang selama ini dicari-cari, yang dulunya hanya berhenti di buku, publikasi, tetapi ini ternyata hasilnya itu bisa langsung diimplementasikan. Aplikatif banget, jadi rekomendasi itu sudah langsung bisa dilaksanakan oleh stakeholder.” (Kutipan Wawancara YS, Analisis Kebijakan Bappelitbangda, 24 Februari 2022)

Kemanfaatan substantif juga dirasakan oleh peneliti mitra dari LSM dan perguruan tinggi. Terjadi proses pengayaan intelektual sepanjang pelaksanaan kajian rintisan K2P tersebut.

“Biasanya saya menganggap orang pemerintah itu kurang terbuka kepada pemikiran baru apalagi yang kritis. Tapi, selama penelitian ini saya melihat mereka cukup terbuka, mau menerima pendapat, tidak gontok-gontokan, begitu juga kalau kami minta informasi yang kira-kira teman-teman di Bappelitbangda yang tahu, mereka dengan senang hati menyampaikan. Jadi ada timbal balik, pertukaran pengetahuan yang terjadi selama proses dan berlangsung dengan baik. Mungkin agak di luar bayangan saya, ya. Begitu juga dengan teman-teman dari akademisi juga seperti itu, tadinya saya pikir kalau dari akademisi mereka kan menganggap orang LSM bagaimana, NGO itu cuma tahunya cuma demo (unjuk rasa) dan sebagainya, tapi tidak tampak hal-hal semacam itu selama proses ini.” (Kutipan Wawancara NS, SRP Payo-Payo, 1 Maret 2022)

“Para pakar dari dunia kampus juga mau mendengar pendapat dari yang lain, dengan kolaborasi semua hal tidak perlu dari nol, bisa dirajut dan dirangkai dari semua pakar.” (Kutipan Wawancara ZG, BaKTI, 23 Februari 2022)

Pandangan bahwa penggunaan bukti dari suatu penelitian kolaboratif relevan dengan kebijakan, diungkapkan dengan menunjukkan bahwa perhatian terhadap pengetahuan tradisional dapat memperkaya substansi kebijakan. Sebagai contoh, kearifan petani lokal tentang iklim dapat berkontribusi pada kebijakan pertanian komoditas tertentu.

“Pengetahuan kompleks yang dimaksud tidak terbatas pada multi disiplin sains, tetapi juga bagaimana kita memberi tempat pada pengetahuan non-sains. Misalnya, pengetahuan personal seseorang yang sifatnya tidak tertulis. Kolaborasi yang dibangun KSI mengarah ke situ. Saya menganggap baik di dunia kampus maupun di dunia pemerintah, kalau praktik seperti ini semakin diintensifkan, maka kompleksitas masalah yang dihadapi akan lebih mudah diurai ketimbang menggunakan satu disiplin ilmu, menggunakan satu ahli. Misalnya bagaimana di dunia pertanian, bagaimana petani tua menyimpan pengetahuan terkait iklim. Itu mungkin kita anggap tidak ilmiah, tetapi bagaimana pun itu adalah sebuah pengetahuan yang jika kita gali, kita kombinasikan dengan pengetahuan yang ilmiah, bisa berharga untuk sebuah kebijakan. (Kutipan Wawancara DS, Anggota TPM dari Unhas, 23 Februari 2022).

Pandangan tersebut menyiratkan relevannya pendekatan multidisiplin dalam riset kebijakan yang komprehensif. Juga membuka perspektif penguat substansi seperti gender, kesetaraan, dan inklusi sosial (GEDSI). Mulai tumbuhnya pemahaman pemerintah tentang isu GEDSI diamati oleh seorang peneliti dalam kajian rantai nilai sutra. Dibuktikan di lapangan bahwa dalam komoditas ini isunya tidak hanya terkait ekonomi, tapi juga gender, inklusi sosial, dan kesetaraan.

“Kalau yang saya rasa cukup bagus adalah pemerintah sudah mulai memiliki perspektif untuk mengintegrasikan isu-isu gender, sosial inklusi, dan pemberdayaan masyarakat ke dalam program mereka. Selain itu mereka menjadi tahu bahwa oh, ternyata seperti itu ya, kita juga harus menghitung ya, bagaimana perempuan pekerja rumah, apalagi kalau dia kepala keluarga tunggal; sumber penghasilannya dari situ. Mereka, kan, akhirnya jadi paham bahwa oh, ini bisa menjadi lahan untuk penghasilan bagi perempuan yang pendidikannya rendah.” (Kutipan Wawancara LP, Pemerhati Gender, 25 Februari 2022)

Pandangan tersebut di atas menggambarkan bahwa kesadaran pemerintah tentang aspek GEDSI dalam pembangunan daerah masih pada tahap awal. Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala Bappelitbangda Sulawesi Selatan berikut ini.

“Justru selama ini yang tidak kita lihat, umur pemintal tidak pernah dimasalahkan, dan ternyata umur itu penting. Coba dibayangkan, seseorang yang sudah berumur 50 tahun tapi tidak punya penerus. Itu menjadi catatan bahwa kita kalau sebenarnya banyak aspek-aspek yang seharusnya menjadi perhatian. Jangka waktu itu sebuah risiko penelitian, makanya ada kajian cepat, dan ada kajian yang bersifat komprehensif.” (Kutipan Wawancara ADB, Kepala Bappelitbangda, 25 Februari 2022)

Tersirat pandangan aktor pemerintah bahwa jenis kajian bisa cepat dengan waktu singkat tapi hasilnya tidak utuh atau sedikit. Hal tersebut umumnya terkait ketersediaan anggaran. Jadi, sesuai urgensinya

dapat dilakukan riset kolaboratif dengan waktu lebih lama, biaya lebih tinggi, tapi bersifat komprehensif. Ke depannya, aspek-aspek GEDSI dapat dimasukkan ke dalam rancangan penelitian seperti ini.

Persepsi tersebut sejalan dengan fakta belum ditindaklanjutinya salah satu rekomendasi kebijakan lintas sektor spesifik tentang isu gender yaitu pelatihan sensitivitas gender dan inklusi sosial serta prinsip *free prior and informed consent (FPIC)* lainnya yang terinternalisasi dalam mandat institusi pemerintah yang ditujukan kepada Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta dinas yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Desa serta LSM di Kabupaten Wajo dan Soppeng yang diusulkan pada tahun 2021.⁶

Dengan demikian, perhatian pada aspek GEDSI dalam kebijakan menuntut riset kolaborasi multipihak dengan pendekatan komprehensif dengan segala konsekuensinya.

2.2. Faktor Penguatan Proses K2P

Rintisan K2P di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penguatan proses dengan respons pimpinan daerah yang positif terhadap lokakarya multipihak bulan November 2019. Di samping itu, penerimaan *stakeholder* terhadap implementasi rintisan umumnya mendukung. Ada dua (2) aspek utama yang menjadi penentu penguatan tersebut. Pertama, kualitas pimpinan pemerintahan dengan komitmen tinggi. Kedua, insentif yang menyertai pelaksanaan.

2.2.1. Komitmen dan kepemimpinan

Faktor paling signifikan adalah komitmen gubernur beserta OPD kunci, yaitu Bappelitbangda. Fungsi katalitik yang dijalankan oleh Yayasan BaKTI bersama KSI berhasil memobilisir potensi yang ada untuk menjalankan kajian menyeluruh. Komoditas sutra dari hulu ke hilir beserta kelengkapan kajian sejak penetapan topik, penelitian lapangan, hingga advokasi dan diseminasi dirancang dan dilaksanakan bersama-sama.

Kemanfaatan yang langsung dirasakan para aktor menjadi motivasi utama untuk mendorong pemanfaatan pengetahuan dalam penyusunan serta penerapan kebijakan. Peningkatan pemahaman dan wawasan, perluasan jejaring, dan kemudahan koordinasi merupakan faktor-faktor penguat penting.

“Komitmen pimpinan yang sangat menentukan. Kemudian cara komunikasi kita ke pimpinan, kemudian kualitas hasil kajiannya sendiri. Kalau misalnya ada hasil kajian, tapi kemudian oleh pengambil kebijakan itu hasil kajian itu tidak dianggap, itu bisa saja diabaikan. Tapi yang terpenting itu tergantung komitmen pimpinan.” (Kutipan Wawancara AI, Bappeda Soppeng, 1 Maret 2022)

“Pada komitmen pimpinan mulai dari kepala OPD sampai Gubernur untuk menjadi kebijakan.” (Kutipan Wawancara AF dan DA, Bappelitbangda Sulsel, 25 Februari 2022)

Komitmen pimpinan daerah diperkuat dengan tercapainya kesepakatan bersama (*memorandum of understanding/MoU*) antara Yayasan BaKTI dengan Gubernur Sulawesi Selatan pada bulan Juli 2020. MoU

⁶ Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, “Laporan Kajian Rantai Nilai Komoditas Sutra Sulawesi Selatan”, ISBN-100621, 2021

tersebut tidak terbatas pada kegiatan K2P saja, tapi juga untuk pertukaran pengetahuan secara luas. Kesepakatan tersebut berlaku selama lima (5) tahun hingga Juli 2025.⁷

MoU tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi melalui hasil ke-litbang-an untuk penyusunan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penguatan koordinasi dan kolaborasi serta pengidentifikasian agenda kebijakan dan prioritas lokal merupakan tujuan bersama.⁸

Sebagai catatan, keberadaan MoU sebagai payung hukum kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Yayasan BaKTI menunjukkan aspek strategisnya pada waktu terjadi gejolak dinamika politik lokal. Penggantian mendadak Gubernur Sulawesi Selatan 2018-2023 pada bulan Februari 2021 oleh wakilnya sebagai pelaksana tugas (Plt) membawa perubahan besar pada pelaksanaan teknis kegiatan rintisan. Walaupun demikian, MoU tersebut masih mengikat dan tetap menjadi rujukan bersama.

2.2.2. Insentif

Faktor penguat penting lainnya adalah insentif yang beragam dan tidak selalu bersifat material. Bentuk-bentuk apresiasi seperti kesempatan menambah pengetahuan, pengalaman dan jejaring (kunjungan lapangan, penelitian bersama di daerah lain atau seminar ilmiah) serta peningkatan karir individual melalui pelatihan dan pendidikan berupa kenaikan jabatan fungsional. Apapun bentuknya, insentif diakui berpengaruh pada motivasi penguatan proses pengetahuan untuk kebijakan.

Bagi seorang peneliti yang paling berharga itu adalah pengetahuan. Tambahan itu mereka kan sudah ada tambahan pendapatan sebenarnya. Jadi, tambahan kalau terlibat sebagai peneliti itu sudah ada. Tapi, memberikan mereka sesuatu yang baru, yang tidak mereka miliki untuk meningkatkan kompetensi mereka itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kajian harus lebih sering dilakukan supaya pengetahuan mereka tidak stagnan.” (Kutipan Wawancara ADB, Bappelitbangda, 25 Februari 2022)

“Mesti ada reward (point) bagi pihak yang terlibat secara individu, misalnya fungsional analisis kebijakan dan fungsional peneliti. Pemprov yang harusnya memberikan reward. Pemprov sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar, seharusnya dibarengi dengan reward untuk inovasi yang menarik.” (Kutipan Wawancara RS, Yayasan BaKTI, 23 Februari 2022)

Insentif penting lain berupa peluang memanfaatkan mekanisme Swakelola Tipe III. Hal ini memungkinkan kemitraan dalam kegiatan kelitbang-an dengan LSM yang berkompeten dalam berbagai isu pembangunan daerah. Pemerintah mendapat *expertise* berkualitas sekaligus melalui proses alih pengetahuan, mendapat peningkatan kapasitas SDM-nya.

Komitmen pimpinan disertai insentif tersebut di atas membentuk fondasi bagi tercapainya keberhasilan rintisan K2P.

⁷ Masa berlaku MoU dengan setiap lembaga pemerintah umumnya selama lima tahun

⁸ Dokumen MoU Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan No: 029/VII/PEM-KB/2020 dengan Yayasan BaKTI No: 001/MoU/BaKTI/VII/2020

2.3. Faktor-faktor pembentuk keberhasilan proses K2P

Berdasarkan pengamatan dan catatan wawancara, dapat dikatakan bahwa keberhasilan rintisan K2P di Sulawesi Selatan disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- Penyelenggaraan lokakarya multipihak oleh KSI beserta jejaringnya nasional di Makassar pada bulan November 2019.
- Respons positif pimpinan daerah terhadap hasil lokakarya.
- Adanya kebijakan yang mendukung kajian rantai nilai sutra berupa Peraturan Daerah Nomor 1/2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan Perda Nomor 7/2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2038.
- Komitmen Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.
- Kapasitas lokal memadai dengan ketersediaan sumber-sumber pengetahuan di kalangan perguruan tinggi dan LSM yang mampu merespons gagasan K2P.
- Yayasan BaKTI sebagai intermediari/katalis dengan kompetensi dan jejaring di kawasan timur Indonesia serta aktor-aktor kunci di Provinsi Sulawesi Selatan. Juga memiliki relasi di tingkat nasional dan internasional cukup kuat.
- Pelaksanaan kajian kolaboratif melibatkan aktor pemerintah, LSM lokal, perguruan tinggi, dan lembaga riset non-pemerintah secara partisipatoris dan inklusif.

Di samping itu, menurut pandangan peneliti, adanya pemahaman para pihak yang sama tentang rantai nilai sutra sebagai tema kajian juga berkontribusi pada keberhasilan.

“Kalau saya, pemahaman semua aktor yang terlibat. Kuncinya ada di situ. Pemahaman tentang kondisi sutra kita. Apalagi kan ini prosesnya panjang, berkali-kali proposalnya dibicarakan, hasilnya didiskusikan. Jadi, salah satu faktor penting sebetulnya dari seluruh proses yang dilakukan itu bahwa semua orang yang terlibat dalam kajian ini memiliki pemahaman yang relatif lebih baik atau paling tidak, lebih komprehensif terkait dengan sutra.” (Kutipan Wawancara Dr. A, Anggota TPM dari UNHAS, 24 Februari 2022)

Kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berperan penting dalam pencapaian tujuan program rintisan. Ini ditunjukkan dengan ditindaklanjutinya sebagian rekomendasi melalui program replikasi kajian rantai nilai komoditas, serta kebijakan yang mengatur ke-litbang-an kolaboratif dan labelisasi sutra khas Sulawesi Selatan.

Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kualitas SDM peneliti yang tinggi dan interaksi dengan TPM yang intensif. Pemilihan tim peneliti menentukan keberhasilan karena didasarkan pada profesionalitas. Keterlibatan lembaga non-pemerintah yang berbasis di Jakarta SMERU dan KPPD di TPM, juga menambah bobot kajian.

“Tim yang terlibat dalam kajian ini semua profesional di bidangnya dengan network yang sangat bagus.” (Kutipan wawancara AA, Kadis Perindustrian Provinsi Sulsel, 22 Februari 2022)

Wawancara dengan para informan mengungkapkan peran Yayasan BaKTI sebagai intermediari, *knowledge broker* dan fasilitator sangat signifikan pada keberhasilan rintisan K2P di Sulawesi Selatan.

“Selama ini saya merasa Yayasan BaKTI sangat membantu. Sebelumnya sudah lama kenal, tetapi baru pada kajian ini saya merasakan kerja sama yang intens. Ternyata BaKTI tidak hanya sekadar

memperkenalkan praktik baik, tetapi juga menjadi intermediari yang betul-betul memfasilitasi kami.” (Kutipan Wawancara YS, Analisis Kebijakan Bappelitbangda Sulsel, 24 Februari 2022)

”Saya belum melihat Lembaga terutama di Sulsel atau KTI [Kawasan Timur Indonesia], yang lebih baik dari BaKTI dari sisi mengorganisir pengetahuan. Jadi, bagi saya fungsi-fungsi semacam itu masih relevan untuk dikerjakan. Yayasan BaKTI itu betul-betul fungsi intermediari saja, mereka tidak dalam posisi memaksakan kehendak atau memaksakan gagasan. Mereka biarkan saja cair, meskipun sebetulnya itu tanggung jawab BaKTI, mereka biarkan saja berlangsung secara dinamis, mereka rekam, lalu sampaikan hasilnya. Menurut saya itu bagus. Satu-satunya interest mereka adalah memastikan kegiatan menghasilkan output yang bagus, yang betul-betul diimplementasikan.” (Kutipan Wawancara Dr. A, Anggota TPM dari UNHAS 24 Februari 2022)

Faktor penguat keberhasilan yang juga terungkap adalah modal sosial yang sudah dimiliki Yayasan BaKTI dan bersama-sama KPPOD mendukung rintisan K2P di Sulawesi Selatan ini. Sudah dimiliki keterikatan (*bonding*) antara aktor-aktor utama yang sudah berakar. Kekuatan ini dibangun oleh perintis Yayasan BaKTI sejak tahun 2009 dengan basis Sulawesi Selatan. Relasi dengan aktor-aktor pemerintah provinsi memperkuat terjadinya perubahan-perubahan positif.

”Salah satu keuntungan Provinsi Sulawesi Selatan yang saya lihat adalah dukungan dari BaKTI dan KPPOD yang cukup kuat”. (Kutipan Wawancara MR, Bappenas, 4 Maret 2022).

Secara umum, kombinasi antara kompetensi Yayasan BaKTI bersandingan dengan Bappelitbangda yang berkomitmen pada pengetahuan sebagai *leading actor* dari pihak pemerintah, menjadikan fungsi fasilitasi secara keseluruhan berjalan baik. Kualitas SDM serta dukungan pengetahuan dari SMERU dan KPPOD melalui TPM, juga berkontribusi pada kualitas hasil. Interaksi dan komunikasi antara para aktor menjadi kunci.

2.4. Faktor-faktor kendala keberhasilan

Ada dua faktor utama yang menjadi kendala yaitu dinamika politik lokal dan merebaknya pandemi COVID-19. Penggantian mendadak Gubernur Sulawesi Selatan 2018-2023 pada bulan Februari 2021 oleh wakilnya sebagai pelaksana tugas (Plt) yang menimbulkan dampak signifikan pada jajaran pemerintahan, termasuk jabatan Kepala Bappelitbangda.

Salah satu pengaruhnya adalah timbul kecenderungan para pejabat pemerintah provinsi untuk menahan diri dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut menjadi kendala yang dihadapi pelaksanaan kajian rintisan berupa terhambatnya tahapan advokasi kebijakan hasil kajian rantai nilai sutra.

Pergantian Kepala Balitbangda yang kemudian melebur dengan Bappeda menjadi Bappelitbangda terjadi sampai lima (5) kali. Tahapan awal rintisan K2P berlangsung di tengah transisi kelembagaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Bappelitbangda di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Perubahan lembaga secara formal terjadi pada Januari 2020.⁹

”Dinamika politik dalam birokrasi pemerintahan menyebabkan terjadi lima (5) kali pergantian Kepala Bappelitbangda yang sejujurnya cukup mengganggu. Banyak kehilangan waktu di situ.

⁹ Pada saat penulisan laporan ini, perubahan kelembagaan akan terjadi lagi sebagai konsekuensi UU No.11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek dan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yaitu pembentukan BRIDA.

Akan tetapi, di akhirnya untungnya kami menemukan Kepala Bappelitbangda yang baik, yang mendukung. Pandemi COVID-19 yang membuat kami sempat stagnan selama 2 bulan, hanya untuk mencari pola dan beradaptasi dengan sistem yang baru dan pola kerja pemerintah yang tiba-tiba online. Tetapi kemudian karena dipaksa oleh situasi, akhirnya terpaksa terbiasa dengan Zoom, yang tadinya kendala, menjadi sesuatu hal yang baik. Karena bisa mendatangkan orang yang terhalang geografi dengan biaya yang murah, tidak perlu mencari waktu yang semuanya available. Dengan pandemi ini justru lebih mudah mendapatkan informasi secara online".
(Kutipan Wawancara RS, Yayasan BaKTI, 23 Februari 2022)

Kendala tersebut di atas dapat diatasi dengan komitmen penuh Kepala Bappelitbangda yang terakhir. Sedangkan untuk adaptasi dengan pandemi Covid-19, kemampuan para aktor untuk mengubah pola interaksi dari konvensional menjadi secara daring sudah terbukti. Bahkan teknis kegiatan menjadi lebih efisien dengan jangkauan internet yang lebih luas.

Kendala lain terkait advokasi kebijakan berkaitan dengan relasi antar OPD. Salah satu faktornya adalah kualitas sumber daya manusia. Seperti diketahui, produksi hasil penelitian dijalankan oleh Bappelitbangda, sedangkan penggunaannya adalah OPD sektoral di daerah.

Walaupun diakui kapasitas sumber daya manusia pelaksana kajian sudah memadai, pada saat berinteraksi dengan aktor pengguna terkadang komunikasi tidak selalu lancar.

"Kalau dalam kasus ini, tantangannya lebih banyak ke upaya advokasi hasil rekomendasi menjadi kebijakan. Setelah penelitian, bahkan sepanjang proses penulisan sampai setelah tulisan jadi, itu sudah banyak kali kita mensosialisasikan hasil. Penelitian ke banyak pihak, ke stakeholder sudah beberapa kali, ke DPRD, ke pemerintah juga, ke dinas-dinas yang berbeda dan relevan, ke masyarakat umum juga sudah pernah dan hasilnya baru Pergub yang tidak terlalu bisa menolong penenun, karena lebih banyak di hilir." (Kutipan Wawancara NS, SRP Payo-Payo, 1 Maret 2022).

Penyebab mendasar adalah masih belum meratanya kapasitas sumber daya manusia jabatan fungsional di bidang penelitian dan analisis kebijakan. Saat ini sumber daya manusia tersebut masih terkonsentrasi di Bappelitbangda sementara di OPD masih memerlukan penguatan.

"Perlu ditindaklanjuti di OPD, meskipun rekomendasi lengkap, tetapi kapasitas SDM terutama di sektor hulu, masih sangat rendah sehingga kemampuan mereka untuk melaksanakan itu masih kurang. Peningkatan kapasitas masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi, pelatihan-pelatihan kemudian in-house training, semacam itulah." (Kutipan Wawancara AS, Ketua Tim Kajian Rantai Nilai Sutera, UNHAS, 28 Februari 2022)

Upaya awal untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia sudah dijalankan dengan fasilitasi pengenalan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) bagi personel OPD di Provinsi Sulawesi Selatan.¹⁰ Kegiatan ini relevan dengan diangkatnya aparatur sipil negara (ASN) menjadi fungsional peneliti dan analisis kebijakan di daerah sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.

¹⁰ BaKTI, Laporan Akhir Program Rintisan Penyusunan Kebijakan Berbasis Pengetahuan di Provinsi Sulawesi Selatan, halaman 24, 2021

3. REPLIKASI DAN KEBERLANJUTAN

Setelah proyek rintisan K2P menghasilkan rekomendasi kebijakan dengan sebagiannya diadopsi ke dalam regulasi di Provinsi Sulawesi Selatan, ada beberapa prakarsa yang sudah dan akan dijalankan pada tahun 2021-2022.

Prakarsa tersebut berupa replikasi kajian rantai nilai komoditas, seperti talas satoimo dan jeruk, serta sub-sektor agrowisata di Kabupaten Pangkep dan Gowa. Prinsip yang diterapkan adalah kolaborasi pemerintah, LSM, dan perguruan tinggi dengan target dihasilkannya rekomendasi kebijakan. Hal tersebut sejalan dengan aspirasi peneliti.

“Agar praktik ini dilakukan terus secara berulang-ulang dengan topik yang berbeda.” (Kutipan Wawancara NS, SRP Payo-Payo, 1 Maret 2022)

Juga untuk replikasi kajian, komitmen Kepala Bappelitbangda Sulawesi Selatan sudah dinyatakan dalam bentuk perencanaan riset kolaborasi. Penting dicatat bahwa kegiatan sebaiknya komprehensif sejak kajian lapangan hingga advokasi dan diseminasi hasil.

“Kemarin kita sudah mulai menyusun inventaris perencanaan pembiayaan agar pembiayaan ini memenuhi untuk melakukan penelitian dengan metode kolaborasi. Yang kedua, kita sudah melakukan penyebaran informasi ke kabupaten, bahwa ada hal-hal yang kita lakukan, ada beberapa kabupaten yang datang juga, saya beritahu. Tapi yang penting adalah Pergub itu kita lakukan sosialisasi dulu kepada kabupaten.” (Kutipan wawancara ADB, Kepala Bappelitbangda, 25 Februari 2022).

Peraturan Gubernur untuk riset kolaboratif yang sedang dirancang diharapkan dapat menjaring pendanaan lintas OPD bahkan lintas daerah. Bagaimana pengaruhnya terhadap keberlanjutan K2P masih harus ditunggu.

Walaupun implementasi K2P secara utuh di daerah masih harus melalui berbagai tahapan yang cukup panjang, langkah-langkah awal sudah mulai dijalankan karena *stakeholder* lokal sudah melihat K2P tersebut penting. Hal ini tercermin dalam pandangan Bappelitbangda tersebut di atas.

Pandangan optimistis disampaikan oleh salah satu *stakeholder* kunci, yaitu Yayasan BaKTI yang melihat prospek replikasi K2P dalam kerangka relasi pemerintah pusat dan daerah.

“Prospeknya sangat besar, bagus, dan Bappenas di tingkat nasional sangat tertarik dengan K2P ini. Bappenas berencana akan menggunakan pembelajaran dari K2P ini untuk menyusun policy paper atau ada kebijakan nantinya yang bisa digunakan untuk perencanaan Bappenas¹¹. Ini bisa dibagikan ke daerah-daerah. Jika dianggap sebagai praktik baik, ini bisa di showcase di forum-forum perencanaan Bappenas dan Kemendagri agar didengar, dan bisa diberikan insentif bagi daerah yang ingin mereplikasi K2P ini. Apalagi KSI sedang intens dengan Kemendagri dan Bappenas untuk menjadikan pembelajaran ini bisa menjadi bahan untuk revisi Permendagri No.

¹¹ Pandangan ini terkait penyusunan Risalah Kebijakan Masukan pada Penyusunan Pedoman Rakortekrenbang tahun 2022 Bappenas yang dilakukan pada pembelajaran K2P di Sulawesi Selatan.

17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.” (Kutipan Wawancara ZG, Yayasan BaKTI, 23 Februari 2022)

Terkait replikasi pandangan lembaga non-pemerintah KPPOD, melihat rintisan K2P di Provinsi Sulawesi Selatan mengusung prinsip inklusifitas dan kolaborasi yang layak di replikasi. Kegiatan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Antar Daerah dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Luar Negeri.¹²

Selanjutnya, Bappenas yang berkepentingan dengan implementasi K2P secara utuh bagi pembangunan daerah memiliki sudut pandang makro yang relevan dengan rintisan di Provinsi Sulawesi Selatan.

“Kami melihat ada kebutuhan akan policy based on evidence dan data, kebutuhan untuk melakukan inovasi dan kebutuhan untuk melakukan koordinasi/kolaborasi, ditambah replikasi dan sustainability, disadari penting oleh semua orang, setiap kelembagaan. Tapi terkadang K/L atau individu bingung; HOW-nya? Memulainya dari mana? Nah, Inilah sebenarnya langkah terobosan atau pioneer, contoh lah, best practice yang dilakukan KSI bekerja sama dengan BaKTI. Jadi HOW-nya sudah dicoba kelima-limanya dalam suatu kegiatan yang lebih riil, lebih nyata, lebih terlihat, jadi lebih jelas. Lebih terlihat. Sebagai contoh, di RPJMN ada, berapa persen kenaikan tiap daerah melakukan inovasi setiap tahunnya, juga upaya melakukan replikasi juga ada ukurannya. Tapi, bagaimana caranya, contohnya mana? Ini membuat KSI leading. Jadi, tiga aspek; evidence, koordinasi/kolaborasi, dan inovasi dibungkus dalam circumstances how to disseminate and replicate ke instansi lain atau pihak-pihak yang berkepentingan.” (Kutipan Wawancara MR, Bappenas, 4 Maret 2022)

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap K2P sudah tumbuh di tingkat nasional. Penekanan pada aspek *how to* menunjukkan implementasi praktik-praktik baik secara masif di semua level masih memerlukan upaya bersama. Yang terpenting adalah merespons isu “memulainya dari mana”?

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga melihat prospek besar untuk replikasi K2P ke daerah lain serta pemanfaatan pengetahuan untuk kebijakan berbasis bukti. Juga, ditekankan pentingnya penguatan pemerintah daerah sebagai koordinator kolaborasi.

“...pasti dibutuhkan secara program. Tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kemendagri mendorong inovasi daerah berbasis tematik dan urusan. Untuk kolaborasi semua sudah faham, tapi siapa aktor yang menjadi koordinatornya ? Kemendagri berharap pemda yang menjadi koordinator untuk penguatan kolaborasi. Yang mengorkestrasi adalah pemda, tentukan PIC-nya dan lakukan penguatan kapasitas. Peran aktor menjadi penting.” (Kutipan Wawancara NL, Kemendagri, 4 Maret 2022)

Pemikiran dari kedua kementerian ini menyiratkan prospek replikasi dan implementasi K2P di daerah beserta keberlanjutannya memerlukan pentahapan strategi untuk koordinasi perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah.

¹² Wawancara AS, KPPOD, 2 Maret 2020

Sejalan dengan pandangan tersebut di atas, dilantiknya Plt Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Ggubernur definitif pada bulan Maret 2022 untuk masa jabatan hingga bulan September 2023, membuka peluang keberlanjutan K2P di Sulawesi Selatan. Pernyataan penting terkait K2P disampaikan pada Yayasan BaKTI waktu audiensi dengan Plt Gubernur tanggal 9 Juni 2021, bahwa: “... *penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan idealnya terintegrasi dalam program strategis provinsi dan melibatkan lembaga independen seperti LSM.*”¹³

Untuk merealisasikan pandangan tersebut di atas, penguatan koordinasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kemendagri, Bappenas, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam merancang program strategis daerah berbasis pengetahuan dan riset, harus dirawat dan dikembangkan melalui berbagai jalur komunikasi.

Secara keseluruhan, fungsi orkestrasi atau koordinator di Sulawesi Selatan yang dijalankan oleh Yayasan BaKTI sebagai mitra Bappelitbangda harus menjadi catatan. Sampai saat ini aktor setempat melihat Yayasan BaKTI masih relevan.

“Saya lihat sampai sekarang itu belum bisa tergantikan karena kapasitas SDM dari BaKTI ini sangat mumpuni. Bisa mengorganisir, bisa menginput, sampai menghasilkan suatu hasil yang memuaskan semua pihak.” **(Kutipan Wawancara AS, Ketua Tim Kajian UNHAS, 28 Februari 2022)**

“Selama ini saya merasa BaKTI sangat membantu. Tetapi baru pada kajian ini saya merasakan kerja sama yang intens, ternyata BaKTI tidak hanya sekadar memperkenalkan praktik baik, tetapi juga menjadi intermediari yang betul-betul memfasilitasi kami.” **(Kutipan wawancara YS, Analisis Kebijakan Bappelitbangda, 24 Februari 2022)**

“Saya belum melihat Lembaga terutama di Sulsel atau KTI, yang lebih baik dari BaKTI dari sisi mengorganisir pengetahuan. Jadi, bagi saya fungsi-fungsi semacam itu masih relevan untuk dikerjakan, BaKTI itu betul-betul fungsi intermediari saja, mereka tidak dalam posisi memaksakan kehendak atau memaksakan gagasan. Mereka biarkan saja cair, meskipun sebetulnya itu tanggung jawab BaKTI, mereka biarkan saja berlangsung secara dinamis, mereka rekam, lalu sampaikan hasilnya. Menurut saya itu bagus. Satu-satunya interest mereka adalah memastikan kegiatan menghasilkan output yang bagus, yang betul-betul diimplementasikan.” **(Kutipan wawancara Dr. A, TPM UNHAS, 24 Maret 2022)**

Ketiga pandangan tersebut di atas mencerminkan kompetensi Yayasan BaKTI. Tentunya, kompetensi dan jejaring Yayasan BaKTI tidak dapat ditiru secara otomatis oleh siapapun. Walaupun demikian, Yayasan BaKTI masih dapat terus berkontribusi dengan berbagi pengetahuan pada aktor lainnya. Hal tersebut sudah mulai dijalankan berupa fasilitasi penguatan kapasitas sumber daya manusia analisis kebijakan. Pelibatan personel Bappelitbangda dalam berbagai kegiatan yang relevan juga dilakukan.

Di sisi lain, Bappelitbangda secara formal akan tetap menjadi aktor utama dalam K2P di daerah berdasarkan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan turunannya Peraturan Pemerintah No 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensinya, OPD ini harus berfungsi sebagai orkestrator atau koordinator pemanfaatan pengetahuan di daerah.

¹³ BaKTI, Laporan Akhir Program Rintisan Penyusunan Kebijakan Berbasis Pengetahuan di Provinsi Sulawesi Selatan, halaman 35, 2021.

Jadi, kolaborasi para aktor sudah menjadi keniscayaan. Kerja sama OPD sebagai aktor pembuat kebijakan, kemitraan *triple helix* atau *N-helix* dengan partisipasi masyarakat luas dan penguatan berbagai aspek kolaborasi, seperti kesetaraan, partisipasi, dan tata kelola menjadi penting. Adapun untuk pemanfaatan pengetahuan bagi pembangunan daerah, Bappelitbangda memiliki posisi penting. Fungsi perencanaan dan ke-litbang-an merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

Mengingat membangun kolaborasi multiaktor tidak mudah, lembaga intermediari memainkan fungsi strategis untuk merajut berbagai elemen secara efektif. Hal ini diperkuat dengan pandangan SMERU yang menyatakan bahwa fungsi *brokerage* yang terlembaga dan menjadi katalis dalam proses perumusan berbagai kebijakan berbasis bukti, penting.¹⁴ Sebagai konsekuensi logisnya, organisasi seperti Yayasan BaKTI perlu diperbanyak. Berbagai lembaga yang sekarang ada dapat mengubah diri menjadi intermediari. Pertama, LSM dapat bertransformasi, kedua, bahkan lembaga pemerintahan pun dapat menjalankan tugas fungsi intermediasi.

Pendapat sebuah LSM menyiratkan kemungkinan pertama.

“Lembaga lain seharusnya juga bisa, karena dalam proses kajian ini telah melibatkan Payo-Payo dan sejumlah OPD seperti yang menangani Analisis Kebijakan, jika sudah melakukan sudah berulang-ulang dalam jangka waktu panjang akan dapat menjadi intermediari juga. Intinya perlu ada lembaga yang mewadahi sebagai intermediari agar proses penelitian tidak “kaca mata kuda”, karena masing-masing lembaga memiliki cara kerja sendiri.” (Kutipan wawancara LP, Pemerhati Gender, 25 Februari 2022)

Kemungkinan kedua, bahkan lembaga pemerintah sudah berfikir untuk mereplikasi praktik-praktik kerja Yayasan BaKTI. Upaya belajar juga sudah mulai dilakukan oleh personel Bappelitbangda.

“Bappelitbangda sudah mulai belajar dengan meniru dan mencontoh cara-cara kerja yang dilakukan oleh BaKTI meski hal ini butuh proses.” (Kutipan wawancara YS, Analisis Kebijakan Bappelitbangda Sulsel, 24 Februari 2022)

“Oleh BaKTI, saya seringkali menjadi notulen dalam setiap proses Kajian Rantai Nilai Sutera. Dari proses itu saya semakin paham kerja-kerja di BaKTI.” (Kutipan wawancara AF, Fungsional Peneliti Bappelitbangda Sulsel, 25 Februari 2022)

Isu utama dalam pembentukan, pengembangan, dan penguatan sebuah fungsi atau organisasi adalah sumberdaya, pendanaan, manusia, aset intelektual, dan fasilitas. Hal tersebut berlaku untuk semua, apapun tema yang diusung, termasuk fungsi intermediari atau orkestrator. Interaksi para aktor intermediari, penghasil, pengguna dan pemampu pengetahuan secara utuh membentuk ekosistem pengetahuan dan inovasi (EPI).¹⁵

Dengan demikian, apapun bentuknya, fungsi intermediari masih tetap relevan dalam membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi baik di daerah maupun di level nasional. Salah satu langkah strategis ke arah penguatan ekosistem tersebut adalah memperkuat jejaring dan kolaborasi.

¹⁴ Wawancara AY, SMERU, 22 Februari 2022.

¹⁵ Bappenas, Kementerian PANRB, BRIN: “Cetak Biru Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi”, Februari 2021.

Penguatan kolaborasi formal melalui jalur birokrasi, dengan asumsi Bappelitbangda sebagai orkestrator adalah upaya penguatan kapasitas dari pemerintah pusat sejalan dengan pandangan Kemendagri (*lihat halaman 16*). Selain Bappenas dan Kemendagri, pembinaan atau pendampingan oleh pemerintah pusat dapat dilakukan melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sesuai tugas fungsinya masing-masing. Tahun 2022 ini ditargetkan dibentuk 50 Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) oleh pemerintah daerah¹⁶. Ke depannya, fungsi BRIDA adalah melakukan koordinasi riset di daerah sesuai dengan UU No 11/2019 tentang Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional.

Untuk bekerja sama dengan aktor selain pemerintah, pemerintah dapat menggunakan pola pendanaan melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Swakelola Tipe III untuk bersama-sama menjalankan sebuah program riset kolaboratif sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan payung hukum berupa Surat Keputusan Kepala Bappelitbangda tentang Petunjuk Teknis Kelitbang kolaboratif. Di sini terbuka ruang kemitraan antar OPD dan juga dengan pihak ketiga.

Saat ini modal awal yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain keberadaan aktor pengetahuan seperti perguruan tinggi dan LSM dan jejaring kerja sama Yayasan BaKTI sebagai saluran informasi dan pengetahuan. Dikombinasikan dengan perubahan perilaku yang sudah berorientasi pada bekerja sama, niscaya dapat mengembangkan kolaborasi ke depan.

“Teman-teman di litbang mindset-nya untuk melaksanakan kajian kolaborasi, melibatkan tidak hanya teman-teman universitas, tetapi juga dari NGO itu mereka lakukan. Saya kemarin diminta oleh Ibu Yvonne untuk kontak teman LSM dan sektor-sektor berdasarkan kepakarannya, karena ingin melibatkan multipihak.” **(Kutipan Wawancara ZG, BaKTI, 23 Februari 2022)**

Prakarsa tersebut terkait dengan upaya penyusunan database Link-LSM, yaitu daftar LSM yang telah memenuhi syarat sebagai pelaksana Swakelola Tipe III, yang dibangun oleh AKATIGA, Konsil LSM, Seknas FITRA dan YASMIB Sulawesi, dan tersedia di www.linklsm.id. Informasi ini dapat mendorong pengembangan jejaring sebagai sarana penyebarluasan pengetahuan dan menghasilkan beragam moda kolaborasi.

Untuk replikasi dan keberlanjutan, peran provinsi ke depan akan semakin strategis dalam konteks pemanfaatan pengetahuan, riset, dan inovasi dalam penyusunan kebijakan di daerah. Yayasan BaKTI menyarankan bahwa untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah kabupaten adalah mempertegas peran provinsi sebagai orkestrator atau koordinator.

“Kami rasa perlu peran provinsi untuk diadvokasi ke teman-teman kabupaten/kota, atau mengadakan showcase, sehingga bisa dilihat langsung. Karena memang salah satu fungsi provinsi seperti itu. Dan perlu lebih intens pendekatan ke pimpinan daerah untuk membagikan contoh praktik baik ini.” **(Kutipan Wawancara ZG, BaKTI, 23 Februari 2022)**

¹⁶ Wawancara WJ, BRIN, 21 Februari 2022

4. REKOMENDASI SPESIFIK UNTUK REPLIKASI DAN BERKELANJUTAN K2P

Berikut ini adalah rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan spesifik pada aktor-aktor yang berbeda; pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, pemerintah pusat, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Rekomendasi ini didasarkan pada hasil wawancara dengan para informan di Sulawesi Selatan. Setiap rekomendasi akan diulas dari aspek implementasinya.

4.1. Pemerintah daerah provinsi

a. Mengoptimalkan regulasi tentang litbang kolaborasi agar menjangkau seluruh daerah provinsi, kabupaten dan kota, serta setiap sektor.

Saat ini Surat Keputusan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sudah terbit sebagai rujukan internal lembaga. Untuk memperluas jangkauannya kebijakan ini harus ditingkatkan menjadi Peraturan Gubernur. Dengan demikian, setiap OPD di daerah kabupaten/kota harus mengikuti ketentuan ini. Upaya ke arah ini masih berlangsung.

Di samping itu, koordinasi dengan Kemendagri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (sebelumnya Badan Penelitian dan Pengembangan) dan Direktorat Pembangunan Daerah Bappenas harus dilakukan.

b. Mendorong Bappelitbangda sebagai orkestrator dan fasilitator

Rekomendasi ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No: 18/2016 Tentang Perangkat Daerah di mana Bappelitbangda merupakan OPD dengan tugas dan fungsi terkait sektor pengetahuan. Walaupun dalam waktu dekat lembaga ini akan bertransformasi menjadi BRIDA, fungsi koordinator bahkan orkestrator dan fasilitator tetap melekat. Bahkan, ruang lingkupnya akan menyentuh setiap kegiatan riset dan inovasi di daerah termasuk yang dilakukan perguruan tinggi.

Selain berkoordinasi dengan Badan Strategi Kebijakan Kemendagri dan Direktorat Pembangunan Daerah Bappenas, hal yang sama juga harus dilakukan dengan Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek Bappenas.

Penguatan kapasitas Bappelitbangda dari aspek sumber daya manusia dan kelembagaan harus dimulai sejak sekarang.

c. Memperbanyak sosialisasi

Sosialisasi didorong agar setiap informasi tentang pembangunan, pengetahuan, dan kebijakan yang dimiliki pemerintah selalu tersampaikan pada setiap aktor yang relevan. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, proses tersebut dapat dilakukan lebih masif dan efektif. Memperkuat unit kerja dengan fungsi seperti Pusat Data dan Informasi atau Biro Komunikasi Masyarakat dapat dipertimbangkan.

Yang juga penting adalah membangun mekanisme *feedback* dari *audience* untuk menggali potensi-potensi tindak lanjutnya. Misalnya, pembentukan forum-forum komunikasi untuk membangun *chemistry* di antara para aktor.

Melalui penyebaran informasi yang efektif, terbentuk modal sosial untuk mulai merencanakan berbagai kegiatan seperti; *knowledge sharing*, komunitas berpraktik baik tematik (*community of practice*) dan *match-making* lintas aktor.

d. Menyusun peta jalan kolaborasi

Peta jalan (*roadmap*) yang dimaknai sebagai rancangan sistematis untuk membangun kolaborasi, dapat disusun oleh pemerintah daerah dengan bantuan aktor lain yang relevan. Di sini dapat diterapkan proses *agenda setting* yang baku dan penyusunan regulasi yang mendorong kolaborasi.

e. Penguatan koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

Penguatan koordinasi dapat didorong melalui rencana pembentukan gugus tugas formal lintas OPD dan lintas kabupaten/kota untuk komoditas sutra. Cakupannya dapat diperluas menjangkau semua komoditas unggulan provinsi lainnya. Agenda kegiatan bisa beragam, misalnya identifikasi isu/komoditas/subsektor bersama yang menyentuh daerah otonom yang bertetangga, pertukaran personel, penguatan jejaring, dan lain-lain.

Yang digali adalah kemitraan berbasis kepentingan bersama. Jadi, komunikasi di semua level menjadi faktor kunci koordinasi provinsi dan kabupaten/kota.

4.2. Pemerintah pusat

f. Melakukan revisi Permendagri No 17/2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Rekomendasi ini sudah sejalan dengan perkembangan di pusat, dan KSI sudah mengirimkan risalah kebijakan tentang masukan pada revisi tersebut. Ada empat (4) prinsip utama dari pembelajaran program rintisan K2P yang diajukan, yaitu kolaborasi, proses bisnis, diseminasi, dan keberlanjutan. Tindak lanjutnya masih dalam tahap pembahasan di Bappenas.

g. Penelitian kolaboratif ini dijadikan sebagai sebuah inovasi ke pusat dan seharusnya ini replikasi nasional karena sudah dilakukan di Sulawesi Selatan

Rekomendasi ini terkait dengan penghargaan daerah berinovasi yang diselenggarakan oleh Kemendagri (Innovative Government Award). Tapi, perlu dilihat apakah indikator penilaian terkait praktik baik K2P (inklusif dan kolaboratif) ini sudah ada? Jika belum, tidak dapat dilakukan penilaian dan perlu dilakukan advokasi untuk perubahan indikator penilaian tersebut.

Lebih jauh lagi, contoh yang masih terbatas pada satu provinsi masih kurang kuat untuk diambil pelajaran yang berlaku secara nasional. Untuk replikasi nasional masih diperlukan gambaran K2P di daerah lain mengingat karakteristik daerah di Indonesia sangat beragam. Tidak dapat direplikasi mentah-mentah, namun memerlukan adaptasi lokal. Beberapa rintisan seperti ini di provinsi lain diperlukan untuk dapat mengangkat replikasi di tingkat nasional.

h. Membuat regulasi dan petunjuk teknis (juknis) terkait peningkatan kompetensi peneliti sebagai tindak lanjut penyetaraan jabatan fungsional peneliti

Petunjuk teknis ini dimaksudkan bagi ASN yang mengalami perubahan dari status struktural menjadi fungsional peneliti atau analis kebijakan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) sudah menerbitkan pedoman terkait fungsional analis kebijakan.

- i. **Juknis ini juga idealnya dapat disesuaikan dengan kondisi daerah. Misalnya, terkait dengan isu yang akan dikaji adalah komoditas unggulan daerah.**

Rekomendasi ini sangat ideal. Artinya, petunjuk teknis jabatan fungsional disesuaikan dengan tingkat kesulitan di daerah. Misalnya, perlakuan pada fungsional peneliti bioteknologi dalam bidang pengembangan perikanan sebagai unggulannya, akan berbeda dengan peneliti bidang ekonomi usaha kecil menengah. Tetapi, tingkat kesulitan terkait isu ini sangat tinggi dan memerlukan orientasi jangka panjang.

Dalam praktiknya, jika pemerintah pusat menerbitkan regulasi tentang kompetensi peneliti di tingkat nasional, diperlukan ruang adaptasi lokal dengan kebijakan daerah apakah peraturan kepala daerah atau peraturan daerah. Hal ini pun berada di ranah lembaga pembina jabatan fungsional. Dibutuhkan koordinasi antar lembaga seperti Kementerian PANDemi-RB, LAN, Kemendagri, dan kementerian/lembaga yang mengampu program riset seperti Kemendikbudristek dan BRIN.

4.3. Perguruan tinggi

- j. **Kajian tidak hanya terpaku pada bidang ilmunya saja tapi juga pada bidang lain (multidisipliner)**

Rekomendasi ini memerlukan komitmen dalam bentuk riset bersama aktor selain perguruan tinggi di samping aktor internal. Pengalaman berinteraksi selama kajian memberi pemahaman bahwa riset multidisipliner bermanfaat untuk dapat menghasilkan rekomendasi yang efektif.

Perguruan tinggi memiliki kekuatan dalam pengayaan stock of knowledge (uji hipotesis, menghasilkan publikasi ilmiah, dan hak kekayaan intelektual) yang memerlukan mekanisme agar dapat berkontribusi pada pemanfaatan. Ini agar tidak terpaku pada bidang ilmunya perlu interaksi dengan aktor lain.

- k. **Menghasilkan SDM peneliti**

Rekomendasi ini sejalan dengan mandat perguruan tinggi. Tetapi, sumber daya manusia peneliti yang dimaksud adalah lulusan yang memiliki *soft skills*, seperti komunikasi, empati, dan keterampilan lain di luar bidang keilmuannya.

- l. **Menyediakan bank data peneliti dengan pemetaan kompetensi**

Pembangunan bank data seperti ini sangat bermanfaat bagi setiap aktor pengetahuan. Perlu dikembangkan sistem *knowledge management* di perguruan tinggi yang kompatibel dengan sistem sejenis di daerah maupun nasional. Bank data dapat menjadi pendorong interaksi dan komunikasi para aktor.

Selama ini, perguruan tinggi secara berkala memasukkan data ke dalam sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola Kemendikbudristek.

- m. **Perguruan tinggi membiayai K2P**

Pendanaan K2P merupakan *concern* bersama. Jika perguruan tinggi akan berkontribusi, harus ada mekanisme yang sudah disepakati. Dengan adanya orkestrator di daerah dapat dibangun program kolaboratif yang menyentuh kepentingan setiap aktor. Jika sesuai dengan misi perguruan tinggi dan regulasi tentunya tidak ada hambatan untuk membiayai K2P.

Sebagai langkah awal, peneliti dari Universitas Hasanuddin yang ikut dalam kegiatan rintisan telah berkomitmen untuk kontribusi anggaran dalam kajian yang dijalankan Bappelitbangda. Jadi, sudah tumbuh kontribusi pengetahuan sekaligus pendanaan yang positif untuk dikembangkan ke depan.

n. Agar penelitian dapat menghasilkan inovasi yang dirasakan langsung, tidak hanya menjadi buku/naskah literasi

Isu ini menyentuh pemanfaatan hasil penelitian. Inovasi hanya akan terbentuk dengan kolaborasi. Jadi, penelitian akan bermanfaat jika aktor pengguna terlibat dalam perancangannya sejak awal. Praktik seperti ini jarang dilakukan karena memerlukan komitmen tinggi untuk memulainya. Orkestrator di daerah dapat memainkan perannya di sini.

o. Memperbanyak kajian akademis untuk pemecahan masalah riil

Peningkatan jumlah kajian akademis lebih bermakna pada penekanan riset. Tidak hanya penelitian, tapi juga penerapan yang lebih bermanfaat. Pengkajian praktis (*problem solving*) dengan tetap menggunakan kaidah akademis.

4.4. Lembaga swadaya masyarakat

p. Agar Yayasan BaKTI dapat mendorong pertemuan dan pertautan pengetahuan yang lebih luas di Indonesia bagian timur

Aspirasi ini menekankan kebutuhan untuk berinteraksi sekaligus pengakuan atas peran positif Yayasan BaKTI selama rintisan.

Rekomendasi tersebut dapat dijalankan dengan dua cara. Pertama, secara sukarela berbagi pengetahuan dengan insentif nonmaterial. Kedua, didorong dalam sebuah skema kerja sama yang harus dirancang oleh para pihak. Insentifnya dapat disepakati dalam penyusunan mekanisme.

Kedua cara tersebut bergantung pada pemanfaatan jejaring kerjasama yang dimiliki Yayasan BaKTI dan dukungan pemerintah melalui Bappelitbangda sebagai orkestrator atau koordinator.

q. Memperkuat pendampingan di lapangan dan pemberdayaan masyarakat

LSM sesuai mandatnya perlu diperkuat melalui berbagai skema kemitraan. Sekarang hampir pasti sudah banyak kegiatan LSM. Tetapi, mungkin kurang berdampak karena masih parsial dan terserak. Pelibatan LSM dalam rintisan K2P menunjukkan potensinya untuk berkontribusi lebih signifikan.

r. Lebih progresif dalam melakukan advokasi

Progresif dalam artian harus lebih banyak membangun interaksi dan komunikasi dengan aktor pemerintahan. Kemampuan soft skills sumber daya manusia menjadi sangat penting.

s. Tetap kritis tapi konstruktif

Karakteristik kritis menjadi ciri positif LSM. Membangunnya agar bersifat konstruktif dapat dilakukan melalui proses belajar terus menerus. Semakin banyak skema kolaborasi dilakukan, akan bertambah kesempatan meningkatkan berbagai ketrampilan dan pengetahuan.

t. Ahli di bidangnya

Penguatan keahlian sehingga menjadi expert (ahli) memerlukan budaya belajar tinggi, waktu, kesempatan, dan keterbukaan pada berbagai pendapat. Hal tersebut dapat dikembangkan melalui beragam skema kemitraan.

u. Mendorong penelitian untuk intervensi program

Penelitian berorientasi praktis memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat dari aktor pengguna. Akar masalah harus betul-betul ditemukan dan penelitian terfokus padanya. Sistem pengelolaan pengetahuan yang andal dapat dibangun bersama-sama aktor lain utamanya, pemerintah dan perguruan tinggi.

Aspirasi atau rekomendasi tersebut di atas dirangkum dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Rangkuman Aspirasi/Rekomendasi Aktor Pengetahuan Sulawesi Selatan

Ditujukan pada	Aspirasi/ Rekomendasi	Ulasan
Pemerintah Provinsi*	Mendorong Bappelitbangda sebagai orkestrator/fasilitator	Hal ini sejalan dengan regulasi
	Memperbanyak sosialisasi	Penyebaran informasi sebagai awal berkomunikasi untuk berbagai prakarsa
	Memperkuat koordinasi provinsi-kabupaten/kota	Ada wacana gugus tugas lintas OPD
Pemerintah Pusat*	Merevisi Permendagri No 17/2016 tentang Pedoman Litbang di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	Sejalan dengan prakarsa KSI menyusun risalah kebijakan masukan pada revisi
	Mendorong replikasi K2P di level nasional	Perlu percontohan di daerah lain
Perguruan Tinggi	Tidak hanya terpaku pada ilmunya, tapi lebih multidisipliner, tapi juga menghasilkan <i>problem solving</i> dan inovasi	Mendorong keterbukaan untuk berkolaborasi Triple- Helix atau N-Helix
	Menyediakan bank data peneliti dengan peta kompetensi	Dapat menjadi bagian KM di daerah
	Turut membiayai proses pelaksanaan K2P	Berlaku untuk tiap aktor kolaborasi K2P

Ditujukan pada	Aspirasi/ Rekomendasi	Ulasan
LSM	Agar Yayasan BaKTI mendorong pertautan pengetahuan yang lebih luas di Indonesia bagian timur	Bentuk pengakuan atas peran Yayasan BaKTI dan dapat didorong jadi bagian kolaborasi
	Memperkuat pendampingan di lapangan	LSM melalui berbagai skema kemitraan dapat meningkatkan kompetensi bersama aktor lain.
	Meningkatkan kompetensi agar mampu melakukan penelitian untuk intervensi program	

***Catatan :**

- Pemerintah provinsi ditujukan pada pimpinan daerah dan Bappelitbangda.
- Pemerintah pusat yang relevan adalah Kementerian Dalam Negeri, BRIN, dan Bappenas.

5. PRASYARAT UNTUK K2P SUBNASIONAL DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN DAN DIREPLIKASI

Dari pendalaman substantif dan wawancara yang dijalankan teridentifikasi beberapa prasyarat utama untuk implementasi K2P di daerah provinsi. Aspek yang akan ditinjau adalah 1) Kebijakan; 2) Kapasitas SDM; 3) Kelembagaan; dan 4) Sumber daya lainnya. Uraian lebih jauh akan menekankan pada prasyarat minimal yang harus ada untuk implementasi dan replikasi K2P tingkat provinsi.

5.1. Kebijakan

Dalam implementasi K2P di suatu provinsi, kebijakan, dan komitmen pimpinan daerah beserta jajarannya merupakan aspek terpenting. Idealnya dukungan tersebut dituangkan dalam dokumen resmi tertulis dan berlaku dalam rentang waktu yang cukup panjang. Sesuai norma di pemerintahan, bentuk MoU dengan masa lima tahun merupakan hal baku dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Tersedianya hasil pemetaan menyeluruh terhadap aktor-aktor pengetahuan (penghasil, pengguna, pemampu, dan intermediari) di daerah mencakup visi, misi, kebijakan, program, kompetensi, serta kualitas relasi antar aktor akan sangat membantu proses penetapan prioritas strategis daerah sebagai tema implementasi K2P. Modal awal yang sudah dimiliki daerah dapat diidentifikasi sebelum pemetaan dilakukan dengan melakukan *check-list* untuk setiap parameternya.

Hasil pemetaan akan mendasari penetapan program prioritas/strategis provinsi yang bersifat lintas kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah Nomor 28/2018 tentang Kerja Sama Daerah dapat menjadi acuan dengan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Bappenas.

Tahap penting dalam implementasi K2P adalah diadopsinya rekomendasi kebijakan ke dalam praktik pembangunan oleh OPD terkait. Diperlukan kebijakan berupa direktif formal agar kualitas rekomendasi betul-betul mencerminkan solusi pada pemecahan akar masalah spesifik di sektor yang diintervensi.

Kebijakan memperkuat mekanisme akuntabilitas penting dipikirkan untuk mendukung kolaborasi serta peningkatan kontribusi pengetahuan pada kebijakan dan praktik pembangunan daerah.

Di samping itu, kebijakan pendukung yang juga penting adalah, peningkatan kualitas ASN sebagai ujung tombak pelaksanaan fungsi pembuatan kebijakan yang diemban pemerintah. Peraturan Menteri PANRB Nomor 17/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional akan menambah kuantitas SDM peneliti dan analis kebijakan di daerah. Kebijakan tersebut perlu disertai dengan program peningkatan kapasitas disesuaikan dengan kekhasan daerah.

5.2. Kapasitas sumber daya manusia

Pengetahuan yang melekat pada SDM akan menjadi modal untuk meningkatkan kualitas layanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing. Seperti diungkapkan oleh sebagian informan, kompleksitas masalah di daerah harus dipecahkan dengan pendekatan multi-disipliner dan komprehensif.

Implementasi dan replikasi K2P memerlukan SDM dengan kualifikasi beragam, tapi sinergis. Kombinasi bidang keilmuan spesifik (misalnya manufaktur, pertanian, ekonomi, bisnis, lingkungan hidup, dan lain-lain), analisis kebijakan, komunikasi, fasilitasi, dan manajemen sangat diperlukan. Maka, informasi tentang SDM yang lengkap dan komprehensif menjadi penting. Ketersediaan basis data SDM dapat dipetakan di tahap awal implementasi dan replikasi K2P.

Dengan tersedianya informasi tentang SDM di daerah dapat dirancang berbagai program pemanfaatan, serta peningkatan kapasitas dan penyusunan strategi implementasi dan replikasi K2P. Sebagai contoh, mendorong mobilitas personel lintas aktor yang relevan untuk mendorong interaksi dan pembelajaran. Hal tersebut dapat diperkuat melalui pemanfaatan jejaring dan kemitraan. Perlu dicatat bahwa BRIN akan mengembangkan kolaborasi dengan industri maupun pemerintah daerah melalui pendekatan berbagai fasilitas riset, personel peneliti, informasi, dan pengetahuan sesuai kebutuhan. *Resource sharing* menjadi prinsip yang harus diturunkan ke dalam perjanjian kerjasama spesifik dan terperinci.

5.3. Kelembagaan

Terkait peran perangkat daerah, perlu dibangun koordinasi dan kolaborasi lintas OPD untuk menangani berbagai tema pembangunan prioritas daerah. Dalam pelaksanaan tugas fungsinya, OPD sering terkendala oleh keterbatasan sumberdaya.

Untuk replikasi pengalokasian sumber daya terkendala oleh :¹⁷

- a. Kegiatan tidak dianggarkan
- b. Besaran anggaran terbatas karena sempitnya ruang fiskal
- c. Dukungan komitmen kepala daerah

Keterbatasan anggaran dapat diatasi jika bermitra dengan OPD lain sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Peran Sekretaris Daerah sebagai perpanjangan pimpinan daerah penting dalam relasi antar-OPD dan juga dengan mitra lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional. Tidak kalah penting adalah peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai mitra pemerintah daerah. Keberlanjutan secara legal akan terjamin jika memiliki payung hukum peraturan daerah (Perda).

Benih *trust* yang terbentuk sepanjang proses pelaksanaan K2P ini akan berkembang menjadi modal sosial membangun kolaborasi. *Trust* merupakan perekat utama.

Yayasan BaKTI dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah berinteraksi sejak tahun 2009 sehingga modal *trust* yang dimiliki sudah memadai untuk merajut kolaborasi. Ke depan, dengan relasi kelembagaan yang memiliki landasan *trust* yang kuat, pemerintah daerah lain akan mampu mereplikasi rintisan K2P ini. Tantangannya adalah membangun kapasitas intermediari di daerah masing-masing. Apakah ada lembaga seperti Yayasan BaKTI di sana? Bagaimana menggalang dukungan program seperti KSI? Seberapa besar kapasitas aktor pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip K2P?

¹⁷ Wawancara AS, 2 Maret 2020

5.4. Sumber daya lainnya

Di samping tiga aspek tersebut di atas, diperlukan sumber daya lain yang mendasar mencakup anggaran, fasilitas, dan infrastruktur. Fungsinya sebagai pendukung. Besarannya beragam karena kapasitas setiap provinsi sangat bervariasi. Sumber daya tersebut dapat diperoleh dari para pihak yang memiliki kepentingan yang sama dengan daerah. Jadi, prinsip kolaborasi menjadi penentu keberhasilan rintisan K2P.

Pertimbangan tersebut di atas dapat diterapkan dalam prakarsa konkret untuk memulai kegiatan rintisan K2P di daerah. Belajar dari praktik di Provinsi Sulawesi Selatan yang menggandeng intermediasi sebagai katalis, memperoleh komitmen pimpinan daerah serta menetapkan mitra strategis sebagai langkah awal, daerah lain yang akan mereplikasi K2P dapat melakukan hal serupa.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:

1. Dapatkan komitmen pimpinan daerah secara formal
2. Tentukan intermediasi sebagai fasilitator dan mitra strategisnya
3. Bentuk tim multipihak sebagai perintis atau *core team* (bisa berbentuk *project management office*)
4. Sediakan anggaran memadai dan harus disertai tata kelola dengan mekanisme akuntabilitas berstandar nasional bahkan internasional, untuk:
 - Perekrutan SDM perintis berintegritas
 - Mulai menciptakan keterhubungan dan membangun komunikasi
 - Mengembangkan jejaring kolaborasi
 - Membangun basis data dan informasi seluruh sumber daya
 - Pemetaan potensi daerah (lihat bagian 5.1)
 - Infrastruktur dasar seperti bangunan fisik dan fasilitas esensial untuk kenyamanan bekerja
 - Penetapan prioritas daerah
 - Menyusun *roadmap* kolaborasi

Adapun prasyarat untuk implementasi dan replikasi K2P sebelum menjalankan langkah-langkah tersebut di atas adalah memiliki informasi akurat tentang :

1. Potensi daerah dalam ketersediaan aktor pengetahuan (*knowledge pool*, LSM, *enabler*, intermediasi) dan modal sosial
2. Lingkungan kebijakan di daerah yang kondusif untuk kemitraan
3. Keberadaan *local champion*

Selanjutnya, pelaksanaan di dapat dilakukan dengan memiliki informasi tersebut. Jadi, mulai dari embrio dilanjutkan dengan konsisten sampai pada tujuan akhir, yaitu memanfaatkan pengetahuan untuk kebijakan pembangunan di daerahnya masing-masing.

6. KESIMPULAN

Implementasi rintisan K2P di Sulawesi Selatan telah membawa perubahan persepsi, peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku para aktor yang terlibat terhadap pembuatan kebijakan berbasis bukti serta penggunaan bukti. Pembuat kebijakan, peneliti, analis kebijakan, perguruan tinggi, dan LSM telah merasakan kemanfaatannya.

Replikasi praktik K2P memerlukan kebijakan dan sumber daya yang memadai. Ke depan, aktor nonpemerintah sebagai mitra pemerintah akan semakin penting. Peran intermediari tetap relevan dalam menggalang kolaborasi. Penguatan kapasitas dan perbanyakan aktor intermediari berkualitas sangat diperlukan.

Keberlanjutan prakarsa pemanfaatan pengetahuan untuk kebijakan berbasis bukti ditentukan oleh bagaimana momentum yang sudah terbentuk dikembangkan dengan semangat kolaborasi. Benih-benih perubahan persepsi, pengetahuan, dan perilaku terhadap pembuatan dan hasil dari kebijakan berbasis bukti harus selalu ditumbuhkembangkan.

Khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan, penting dilakukan berbagai upaya merawat dan mengembangkan relasi antara pimpinan daerah, Yayasan BaKTI beserta seluruh simpul jaringannya, LSM, perguruan tinggi, Bappenas, Kemendagri, dan simpul-simpul pengetahuan (*knowledge pool*) dalam dan luar negeri yang sudah diperoleh. Daerah lain dapat belajar dari rintisan K2P tersebut dengan semangat kolaborasi yang tinggi.

Jakarta, 14 April 2022

